

Analisis Pelanggaran Hak Pada Manusia Yang Dilakukan Oleh Organisasi Yang Ada Di Papua

Faturohman¹, Franc Diego Sinaga², Filan Tropi Hulu³

^{1,2,3} Universitas Bina Bangsa

Email : arturcikaseban@gmail.com¹, egeevil@gmail.com²,

filantropihulu922@gmail.com³

Abstract The implementation of human rights in Papua has been a matter of national and international concern for several decades. This prolonged conflict can involve various factors, including government organizations. Violations of this right can be carried out by other organizations in Papua and can have an impact on the local community. Papua has a long history of conflict, armed conflict between the army and separatist groups such as the Papuan Organization which has caused various violations of rights. Not only that, there are also various military operations that can be carried out to control the security situation, which often results in accusations of serious violations of rights. Many efforts were involved in solving this case, namely by using torture and other violence. The existence of this case certainly has various impacts, one of which is that these violations have resulted in psychological trauma, insecurity, and also a decline in the quality of life of the people in Papua. In addition, distrust of the government and security agencies is increasing, exacerbating conflict situations and can also hamper the peace process.

Keywords: Rights, Conflict, Violation

Abstrak Pelaksanaan pada hak manusia yang ada di Papua ini, telah menjadi suatu perhatian yang dilakukan secara nasional maupun internasional selama beberapa decade. Konflik yang berkepanjangan ini dapat melibatkan berbagai faktor, termasuk organisasi pada pemerintahan. Pelanggaran pada hak ini dapat dilakukan oleh organisasi lainnya yang ada di Papua, serta dapat memiliki dampak terhadap masyarakat setempat. Papua memiliki sejarah konflik yang panjang, adanya konflik bersenjata antara tentara dan juga kelompok separatis seperti organisasi Papua yang mereka ini telah menyebabkan berbagai suatu pelanggaran pada hak. Bukan hanya itu, ada juga berbagai operasi militer yang dapat dilakukan untuk mengendalikan situasi keamanan ini sering sekali berujung pada tuduhan pelanggaran pada hak yang dilakukan secara serius. Banyaknya upaya yang terlibat dalam menyelesaikan kasus ini, ialah dengan cara melakukan penyiksaan, dan kekerasan lainnya. Adanya kasus ini, pastiya memiliki berbagai dampak, ialah salah satunya adanya pelanggaran-pelanggaran ini telah mengakibatkan trauma psikologis, ketidakamanan, dan juga adanya penurunan kualitas hidup masyarakat di Papua. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan instansi keamanan pun menjadi meningkat, memperburuk situasi konflik dan juga dapat menghambat proses perdamaian.

Kata Kunci: Hak, Konflik, Pelanggaran

PENDAHULUAN

Pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh yang terkait seperti pidana yang dapat tergolong tidak seberat kejahatan. Wilayah Papua, Indonesia, sejak lama menjadi pusat perhatian karena memiliki berbagai konflik yang berkepanjangan antara pemerintah Indonesia dan kelompok separatis yang dapat menuntut kemerdekaan. Konflik ini memiliki dampak yang sangat serius pada situasi hak yang dimilikinya.

Papua merupakan wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam, namun penduduknya sering kali merasa terpinggirkan dan tidak menikmati hasil dari kekayaan tersebut. Operasi militer yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kelompok separatis seringkali dilaporkan disertai dengan pelanggaran hak pada manusia yang sangat berat, seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, dan kekerasan seksual.

Di sisi lain, kelompok separatis seperti organisasi Merdeka pada pua ini, dapat dilaporkan dengan melakukan suatu pelanggaran terhadap warga sipil yang dianggap bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Konflik ini tidak hanya menyebabkan kerugian secara fisik dan mental bagi masyarakat setempat, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Adanya penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, ialah banyaknya laporan tentang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap warga oleh aparat keamanan Indonesia.

Ini termasuk penahanan tanpa proses hukum yang jelas, adanya penyiksaan pada fisik dan psikologis, serta perlakuan kejam lainnya. Adanya kasus-kasus militer, seperti adanya penyiksaan terhadap aktivis hak pada manusia dan masyarakat adat yang menentang operasi militer atau kegiatan pertambangan. Adanya kasus pembunuhan di luar hukum, ialah banyaknya operasi militer dapat melakukan tujuan untuk mengatasi kelompok separatis sering kali berujung pada pembunuhan di luar proses hukum terhadap warga sipil yang dianggap sebagai simpatisan separatis.

Bukan hanya itu saja, adanya penahanan yang dilakukan secara sewenang-wenangnya yang dimana banyaknya aktivis yang di tahan tanpa adanya proses hukum yang jelas dan sering kali tanpa akses ke pengacara atau keluarga. Dan juga adanya penahanan yang dilakukan secara massal terhadap penduduk asli Papua dalam konteks operasi militer untuk mencari anggota kelompok separatis. Adanya kasus kekerasan seksual yang dimana ini dapat dilaporkan tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap perempuan dan anak-anak Papua.

Adanya perampasan tanah dan juga pelanggaran pada hak yang dimiliki oleh manusia, ialah adanya suatu perusahaan yang beroperasi di Papua sering kali merampas tanah adat tanpa persetujuan pada masyarakat setempat dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Dan pastinya memiliki dampaknya seperti kehilangan tanah adat dan sumber mata pencaharian bagi masyarakat Papua, yang berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka.

Bukan hanya berdampak pada itu saja, akan tetapi juga dapat berdampak pada masyarakat yang ada di Papua seperti :

1. Orang papua pasti mengalami trauma pada psikologis, ialah adanya pelanggaran pada hak yang dimiliki oleh manusia ini di sebabkan karena adanya trauma psikologis yang mendalam bagi masyarakat Papua, terutama bagi mereka yang langsung mengalami kekerasan.

2. Adanya ketidakpercayaan pada pemerintah, ialah adanya pelanggaran pada hak ini dapat berulang kali terjadi karena ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pemerintah dan aparat keamanan.
3. Kemiskinan dan juga keterbelakangan, ialah adanya konflik yang berkepanjangan dan juga adanya suatu pelanggaran pada hak ini dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi di Papua, mengakibatkan kemiskinan dan keterbelakangan.

Adanya berbagai upaya dalam menangani kasus ini, ialah sebagai berikut :

1. Melakukan reformasi kebijakan pada keamanan, ialah dapat mengurangi keberadaan militer di Papua dan menggantinya dengan pendekatan keamanan yang berfokus pada perlindungan hak
2. Meningkatkan akuntabilitas aparat keamanan melalui pelatihan hak pada manusia dan juga adanya penegakkan hukum yang tegas terhadap pelanggar.
3. Mendorong dialog antara pemerintah, kelompok separatis, dan perwakilan masyarakat Papua untuk mencapai solusi damai yang berkelanjutan.
4. Melibatkan pihak internasional sebagai mediator untuk memastikan proses yang adil dan transparan.

Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk pelanggaran pada hak manusia yang terjadi di Papua?
2. Bagaimana dampak pelanggaran hak pada manusia terhadap masyarakat Papua?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis deskriptif, ialah metode yang membahas tentang suatu fenomena atau suatu gambaran hukum yang dilakukan secara nyata yang sudah di atur di dalam peraturan perundang-undangan yang di tetapkan.

PEMBAHASAN

Bentuk pelanggaran pada hak manusia yang terjadi di Papua ini sangat berbagai bentuk pelanggaran hak yang telah dilaporkan, ialah :

1. Adanya penyiksaan dan perlakuan yang dilakukan secara tidak manusiawi, ialah adanya penahanan dan penyiksaan fisik maupun psikologis terhadap warga sipil dan aktivis, sering kali tanpa proses hukum yang jelas.
2. Pembunuhan yang dilakukan di luar hukum, ialah adanya kasus kejam seperti pembunuhan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap warga yang dicurigai terlibat dengan kelompok separatis atau kegiatan politik.

3. Adanya penahanan yang dilakukan secara sewenang-wenang, ialah adanya penangkapan dan juga penahanan yang tanpa dasar hukum yang jelas atau akses terhadap pengadilan yang adil, terutama terhadap aktivis dan jurnalis.
4. Adanya kekerasan seksual, ialah kasus pada kekerasan seksual ini dapat dilakukan oleh aparat keamanan terhadap perempuan dan anak-anak di Papua.
5. Adanya perampasan tanah dan pelanggaran pada hak, ialah adanya perampasan pada tanah adat yang bertujuan untuk suatu proyek pada pertambangan atau suatu perkebunan tanpa persetujuan atau kompensasi yang layak bagi masyarakat setempat.
6. Adanya suatu pembatasan pada kebebasan berbicara dan juga berkumpul, ialah adanya suatu pembebasan terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat, termasuk penindasan terhadap demonstrasi damai dan penyensoran media.
7. Penghilangan paksa, ialah adanya kasus pada orang hilang yang diduga diculik oleh aparat keamanan atau kelompok separatis tanpa informasi jelas tentang nasib mereka.
8. Adanya penggunaan yang memiliki kekuatan yang sangat berlebihan, ialah adanya penggunaan kekuatan yang dilakukan secara berlebihan oleh aparat keamanan dalam operasi militer atau penanganan unjuk rasa, yang sering kali berujung pada kematian atau luka serius.
9. Adanya intimidasi dan pengawasan yang ketat, ialah adanya intimidasi terhadap aktivis, jurnalis, dan warga sipil, serta pengawasan ketat terhadap kegiatan mereka yang dianggap subversif atau mendukung kemerdekaan Papua.
10. Diskriminasi dan marginalisasi, ialah adanya diskriminasi secara sistematis terhadap suatu penduduk asli Papua dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan publik.

Dampak pelanggaran hak pada manusia terhadap masyarakat Papua

Pelanggaran pada hak manusia ini terus terus berlangsung di Papua, yang pastinya memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap masyarakat setempat. Dampak-dampak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari fisik, psikologis, sosial, hingga ekonomi. Berikut adalah beberapa dampak utama dari pelanggaran pada hak terhadap masyarakat Papua:

1. Manusia yang ada di Papua, pastinya memiliki rasa trauma pada psikologis dan emosionalnya. Ini karena adanya kasus kekerasan dan juga penyiksaan yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung terhadap kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi oleh aparat keamanan atau kelompok bersenjata dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam

2. Adanya rasa ketakutan dan ketidaknyamanan, ialah adanya kehadiran militer yang intensif dan juga operasi keamanan yang sering kali disertai kekerasan menciptakan perasaan takut dan ketidakamanan di kalangan masyarakat. Hal ini dapat menghambat suatu aktivitas sehari-hari dan menciptakan suasana ketidakpercayaan terhadap otorita
3. Adanya kerugian secara fisik maupun kesehatan, ialah adanya cedera dan juga tingkat kematian yang tinggi karena adanya kasus penahanan yang dilakukan secara sewenang-wenang, penyiksaan, dan juga kekerasan fisik lainnya menyebabkan banyak korban mengalami cedera serius atau bahkan kematian.
4. Kesehatan masyarakat, berupa adanya kondisi pada kesehatan masyarakat Papua yang sangat memburuk akibat kurangnya akses ke layanan kesehatan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil yang dapat berdampak negative pada suatu konflik.
5. Adanya kemiskinan dan ketidaksetaraan di sektor ekonomi, ialah adanya perampasan pana tanah adat untuk suatu proyek-proyek seperti tambang, perkebunan, dan juga infrastruktur, yang dapat menyebabkan hilangnya sumber mata pencaharian tradisional bagi banyak masyarakat adat Papua. Akibatnya, mereka jatuh ke dalam kemiskinan dan kehilangan akses ke sumber daya alam yang penting untuk kehidupan sehari-hari.
6. Kurangnya investasi dan pembangunan, ialah adanya ketidakstabilan yang disebabkan oleh konflik dan pelanggaran pada hak ini dapat menghambat investasi dan pembangunan ekonomi di Papua. Infrastruktur yang buruk dan layanan publik yang terbatas memperburuk ketidaksetaraan ekonomi antara Papua dan daerah lain di Indonesia.
7. Dapat berdampak pada kerusakan sosial dan budaya :
 - a. Adanya disintegrasi pada komunitas, ialah adanya kekerasan dan konflik menyebabkan perpindahan yang dilakukan secara paksa dan disintegrasi komunitas-komunitas adat. Banyak keluarga yang tercerai-berai dan komunitas yang kehilangan ikatan sosial mereka.
 - b. Adanya erosi pada budaya, ialah adanya perampasan pada tanah dan juga adanya perubahan pola hidup akibat tekanan eksternal mengancam keberlangsungan budaya dan tradisi masyarakat adat Papua
8. Adanya ketidakpercayaan terhadap pemerintah :
 - a. Krisis akan legitimasi, ialah suatu pelanggaran pada hak dapat dilakukan oleh suatu aparat keamanan dan kurangnya akuntabilitas menimbulkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pemerintah. Masyarakat Papua merasa diabaikan dan diperlakukan tidak adil oleh negara.

- b. Adanya radikalisasi dan juga suatu perlawanan, ialah adanya suatu ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan juga pengalaman kekerasan mendorong sebagian masyarakat untuk mendukung gerakan separatis atau melakukan perlawanan terhadap otoritas negara.
9. Adanya pembatasan pendidikan dan kesempatan :
- a. Gangguan pada pendidikan, merupakan suatu kekerasan dan operasi yang dilakukan oleh yang terlibat ini sering kali mengganggu proses pendidikan, dengan sekolah-sekolah yang ditutup atau digunakan sebagai basis militer. Anak-anak Papua kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
 - b. Kurangnya akses ke kesempatan di sektor ekonomi, ialah adanya ketidakstabilan dan kemiskinan menghambat akses masyarakat Papua ke peluang ekonomi dan pengembangan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.
10. Isolasi dan marginalisasi :
- a. Adanya akses yang sangat terbatas guna melakukan informasi, ialah dilakukannya pembatasan terhadap kebebasan pers dan kontrol informasi membuat masyarakat Papua terisolasi dari dunia luar. Informasi tentang pelanggaran suatu hak, ini sering kali tidak sampai ke publik luas atau komunitas internasional.
 - b. Marginalisasi sosial, ialah masyarakat Papua ini sering kali merasakan terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dampak pelanggaran pada hak ini, terhadap masyarakat Papua sangat kompleks dan menyentuh berbagai aspek kehidupan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk reformasi kebijakan keamanan, penguatan perlindungan, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta upaya untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di Papua. Upaya rekonsiliasi dan dialog yang inklusif antara pemerintah dan masyarakat Papua juga sangat penting untuk menciptakan perdamaian dan keadilan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hak pada manusia merupakan hak yang sudah melekat secara alamiah sejak manusia lahir. Tanpa hak tersebut, manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia utuh. Pelanggaran pada hak yang terjadi di Papua ini mencakup berbagai bentuk dan melibatkan berbagai aktor, termasuk aparat keamanan, kelompok separatis, dan entitas korporasi :

1. Adanya penyiksaan dan perlakuan yang dilakukan secara tidak manusiawi, ialah adanya aparat keamanan, termasuk lembaga yang terkait ini sering skelai melakukan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap warga sipil, aktivis, dan masyarakat adat. Penyiksaan fisik dan psikologis digunakan untuk menakut-nakuti dan mengontrol penduduk setempat.
2. Adanya pembunuhan di luar hukum, ialah adanya pembunuhan ini terjadi karena konteks operasi keamanan yang dilakukan untuk mengatasi kelompok separatis. Warga sipil sering menjadi korban dalam operasi ini, yang dilakukan tanpa proses hukum yang jelas.
3. Adanya penahanan yang dilakukan secara sewenang-wenangnya, ialahnya banyaknya warga negara Papua, termasuk aktivis dan masyarakat adat, ditahan tanpa proses hukum yang transparan. Penahanan sering kali dilakukan tanpa akses ke bantuan hukum dan dalam kondisi yang tidak manusiawi
4. Melakukan perdagangan pada manusia, ialah baik untuk eksploitasi tenaga kerja maupun eksploitasi seksual, merupakan masalah serius di Papua. Korban perdagangan manusia sering kali dipekerjakan dalam kondisi yang tidak manusiawi dan tanpa perlindungan hukum.

Pelanggaran hak yang ada di Papua memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap masyarakat setempat, mencakup trauma psikologis, kerugian fisik, kemiskinan, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan erosi budaya. Mengatasi pelanggaran hak ini, dapat memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk reformasi kebijakan keamanan, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, peningkatan akuntabilitas aparat keamanan, dan promosi dialog damai yang inklusif. Upaya ini harus didukung oleh komitmen dari pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di Papua.

Pelanggaran pada hak yang terjadi di Papua memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap masyarakat setempat. Berikut adalah kesimpulan mengenai dampak-dampak tersebut :

1. Adanya trauma pada psikologis dan emosional, ialah adanya pelanggaran pada hak seperti adanya penyiksaan, kekerasan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh aparat keamanan menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Masyarakat mengalami gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, dan kecemasan yang berkepanjangan, menghambat kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara normal.
2. Adanya kerugian secara fisik maupun kesehatan, ialah banyak sekali korban yang mengalami cedera serius atau kematian akibat kekerasan fisik. Selain itu, kondisi

kesehatan masyarakat Papua memburuk karena akses yang terbatas ke layanan kesehatan, terutama di daerah konflik. Trauma psikologis juga berdampak negatif pada kesehatan mental masyarakat.

3. Adanya tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan di sektor ekonomi, aialah adanya kasus pelanggaran seperti perampasan pada tanah adat dan hilangnya sumber mata pencaharian tradisional mendorong masyarakat adat ke dalam kemiskinan. Ketidakstabilan yang disebabkan oleh konflik dan pelanggaran hak dan juga dapat menghambat investasi dan pembangunan ekonomi di Papua, memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dengan daerah lain di Indonesia.
4. Adanya kerusakan di sektor sosial dan budaya :
 - a. Konflik dan kekerasan dapat menyebabkan adanya disintegrasi komunitas-komunitas adat, yang dapat memaksa banyak sekali keluarga untuk dapat berpindah tempat. Perampasan tanah dan juga adanya perubahan pola hidup mengancam keberlangsungan budaya dan tradisi masyarakat adat Papua.

Dampak pelanggaran pada hak terhadap masyarakat Papua sangat kompleks dan mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk reformasi kebijakan keamanan, penguatan perlindungan, serta upaya untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di Papua. Dialog yang inklusif dan rekonsiliasi antara pemerintah dan masyarakat Papua juga sangat penting untuk menciptakan perdamaian dan keadilan yang berkelanjutan. Upaya ini harus didukung oleh komitmen dari semua pihak, termasuk suatu pemerintah dan lembaga yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- A.G. Sudarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pustaka Pelaja
- Muladi. 2002. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia. The Habibie Center. Jakarta